



November Malioboro Steril Kendaraan Bermotor

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Wajah kawasan pedestrian Malioboro bakal berubah total menjelang akhir tahun ini. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY resmi membidik akhir November 2026 sebagai momentum krusial untuk mensterilkan jantung wisata tersebut dari operasional kendaraan beremisi gas buang. Langkah berani itu mempertegas komitmen penerapan kebijakan Low Emission Zone (LEZ) alias Kawasan Rendah Emisi di

sepanjang sumbu filosofis. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Chrestina Erni Widayastuti menegaskan, pembatasan ketat akan diberlakukan setiap hari tanpa ampun setelah melewati tenggat waktu November mendatang. Akses Malioboro nantinya bakal dikunci rapat dan hanya dikhususkan bagi transportasi ramah lingkungan alias non-BBM. "Target terdekat di akhir November nanti tidak ada bentor (becak motor) lagi di Malioboro.

Yang boleh melintas hanya yang non-BBM, jadi becak kayuh sama becak listrik," tegas Erni kemarin (8/6). Tak hanya bentor yang bakal "ditendang" dari jalur utama. Kendaraan bermotor pribadi, baik roda dua maupun roda empat pun dilarang melintas bebas. Hak istimewa melintasi aspal Malioboro nantinya hanya diberikan untuk kendaraan darurat (ambulans dan damkar), angkutan umum Trans Jogja, becak tradisional serta becak listrik. "Trans Jogja juga terus kita

upayakan nanti ada tambahan armada bus listriknya, supaya layanan lingkungan ini semakin baik. Untuk bajaj sama halnya, nanti juga tidak diperkenankan melintas," imbuh Erni. Guna memastikan kebijakan itu tidak loyo di lapangan, Dishub DIY bakal memasang papan informasi dan imbauan larangan di berbagai titik strategis pintu masuk Malioboro. Koordinasi matang dengan Pemkot Jogja dan aparat kepolisian juga digalang untuk menyiapkan sanksi

hukum bagi para pelanggar yang nekat menerobos. Ambisi mewujudkan Malioboro "nol emisi" di bulan November bukan tanpa ganjalan. Tantangan terbesar saat ini ada pada urusan isi dompet dan kesiapan armada. Erni membeberkan, populasi becak di kawasan Malioboro saat ini mencapai kisaran 900 unit. Sementara, ketersediaan becak listrik alternatif baru menyentuh angka ratusan unit. Ditambah lagi, tenggat waktu menyisakan kurang dari enam bulan.

Untuk mengejar kekurangan tersebut, Pemda DIY gencar melayangkan proposal kemitraan ke berbagai korporasi raksasa seperti BNI, PLN, hingga mencolek Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Lantas, bagaimana nasib pemilik bentor? Erni memastikan tidak ada skema ganti rugi berupa uang tunai dari kantong pemerintah. Namun, para pengemudi difasilitasi melalui koperasi. Bentor yang dilarang beroperasi wajib

dihancurkan, namun mesin dan rangka besinya bisa dijual. "Nanti dari koperasi becak sendiri yang akan mengorganisasi untuk diuangkan," jelas Erni. Untuk mendukung operasional jangka panjang, infrastruktur "pom bensin" masa depan alias stasiun pengisian daya juga terus dikebut. Selain fasilitas yang sudah eksis di TKP Ketandan, kawasan Jalan Margo Utomo (Senopati) dibidik menjadi titik stasiun pengisian daya berikutnya. (*eri/bid/wa*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005